



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No.7, Tarempa Selatan
Telp (VOIP) 9500 Kode Pos 29791 E-mail : pu@anambaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NOMOR : 01 /DPU.PR.PR.KP-SK/PPK-PPTK.821/01.2025

T E N T A N G

**TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjalankan Tugas dan Fungsi perangkat daerah perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dituangkan dalam daftar pengelolaan anggaran belanja perangkat daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan fungsi perangkat daerah sebagaimana tersebut butir a diatas perlu ditunjuk dan diangkat Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas yang dipandang mampu menjalankan tugas-tugas sebagaimana tersebut butir a diatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b diatas, dipandang perlu menunjuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nonor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan

Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 54);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 82);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 101)

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 104
29. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 253) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Hibah Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 600;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 626);
32. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025**
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perangkat Daerah dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA** : Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sebagaimana

dimaksud DIKTUM KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun perencanaan pelaksanaan pengadaan;
- b) Menetapkan Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c) Menetapkan rancangan kontrak dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- d) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- e) Mengusulkan jadwal perubahan kegiatan;
- f) Menetapkan Tim Pendukung/Tenaga Ahli;
- g) Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- h) Menerbitkan Surat Penetapan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- i) Mengendalikan kontrak;
- j) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kinerjanya kepada pengguna anggaran (PA);
- k) Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan 100% kepada PA dengan berita acara penyerahan (BAST);
- l) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- m) Menilai kinerja penyedia.

Selain melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas, PPK juga melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA yang meliputi :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
2. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KELIMA : Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Membantu PA/KPA mengendalikan pelaksanaan kontrak/kegiatan;
- b) Melaporkan perkembangan progres kegiatan kepada PA/KPA;
- c) Bertanggungjawab atas tugas yang diberikan PA/KPA;
- d) Membantu PA/KPA, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
- e) Membantu PA/KPA menyiapkan dokumen anggaran yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : Januari 2025

KEPALA DINAS,



SYARIF AHMAD, SE.M.Si

Pembina Tk.I (IV/ b)

NIP. 19770720 201001 1 016

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan) ;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan);
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
6. Pejabat Pengadaan Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
7. Bendahara Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
8. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan di Tempat.

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBASTAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PPK UNIT KERJA	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	SYARIF AHMAD, SE,M.Si NIP. 19770720 201001 1 016	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Dinas	▪ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Kegiatan : - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ; ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ✓ Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Administrasi Umum Perangkat Daerah ; ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;

					✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;
2.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	ZUHERMAN, ST NIP. 19850728 201001 1 015	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	▪ Program Kawasan Permukiman kegiatan : - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha : ✓ Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh. ▪ Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Kegiatan : - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan : ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

				▪ Program Pengembangan Perumahan; Kegiatan : - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota: ✓ Sub Kegiatan Rehab Rumah Bagi Korban Bencana ✓ Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.
3.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	ARI SUPRIYONO, S.Sos NIP. 19820421 201001 1 019	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Penataan Ruang Jasa Konstruksi ▪ Program Pengembangan Jasa Konstruksi; Kegiatan : - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi : ✓ Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota. ▪ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Kegiatan : - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota; ✓ Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan RuangTata Ruang Daerah Kabupaten Kota; ▪ Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan; Kegiatan : - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; ✓ Sub Kegiatan Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh

					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. ▪ Program Penatagunaan Tanah; Kegiatan : - Penggunaan Tanah Yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota; ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
4.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	MUHAMMAD HATTA, ST NIP. 19811113 201212 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Sumber Daya Air	▪ Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Kegiatan : - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ✓ Sub Kegiatan Pembangunan Breakwater ✓ Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai ✓ Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya ▪ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Kegiatan : - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota ; ✓ Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan ;

5.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	AMIRUDDIN,S.IP NIP. 19771218 201101 1 001	Penata (III/c)	Kepala Bidang Bina Marga	■ Program Penyelenggaraan Jalan; Kegiatan : - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota ; ✓ Sub Kegiatan Pembangunan Jalan; ✓ Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan; ✓ Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan; ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan. ✓ Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
----	---	---	----------------	-----------------------------	---

6.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	DONI NOVIANDI, ST/ NIP. 19841121 201404 1 001	Penata TK.I (III/.d)	Kepala Bidang Cipta Karya	▪ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Kegiatan : - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota; ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan. ✓ Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan ▪ Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional; Kegiatan : - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota; ✓ Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. ▪ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Kegiatan : - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota; ✓ Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman. ▪ Program Pengembangan Permukiman; Kegiatan : - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; ✓ Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
----	---	---	----------------------	------------------------------	---

Program Penataan Bangunan Gedung; Kegiatan : - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota. ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung ✓ Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya; Kegiatan : - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.			

7.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	EFFENDI NIP. 197101018 199703 1 000	Penata Tk.I (III/d)	Kepala SPAM	UPT	▪ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota ✓ Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ▪ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD SPAM) ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD SPAM)
----	---	---	---------------------	----------------	-----	---

Ditetapkan di : Tarempa
 Pada Tanggal : Januari 2025

KEPALA DINAS,

SYARIF AHMAD, SE.M.Si
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19770720 201001 1 016

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas
 Nomor : /DPU.PR.PR.KP-SK/PPK.PPTK.821/C
 Tanggal : Januari 2025

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIKIS KEGIATAN (PPTK) PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBASTAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	PRAYOGI WIBOWO, SH/NIP. 19860426 201404 1 001	Penata (III/c)	Perencana Muda	▪ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Kegiatan : - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ; ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ✓ Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Administrasi Umum Perangkat Daerah ; ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

				- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;
2.	HARMINI, S.Hut/ NIP.19781208 201101 2 001	Penata Tk.I (III/d)	Penata Ruang Ahli Muda	▪ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Kegiatan : - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota; ✓ Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang/Tata Ruang Daerah Kabupaten Kota;
3.	M.HADLER ROLIN, ST/ NIP.19851029 201902 1 001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pertanahan	▪ Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan; Kegiatan : - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; ✓ Sub Kegiatan Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

				▪ Program Penatagunaan Tanah; Kegiatan : - Penggunaan Tanah Yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota; ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
4.	NURUL ANNISA, ST /NIP.19950830 201902 2 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pembina Jasa Kontruksi Ahli Pertama	▪ Program Pengembangan Jasa Kontruksi; Kegiatan : - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatn Jasa Konstruksi; ✓ Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
5.	ZULFAHRI EFFENDY, ST/NIP. 19880714 201101 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	▪ Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional; Kegiatan : - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota; ✓ Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. ▪ Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya; Kegiatan : - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

6.	MARWAN, ST/ NIP. 19880303 202012 1 011	Penata Muda (III/a)	Analisis Bangunan dan Perumahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Kegiatan : - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota; ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan. ✓ Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan ▪ Program Pengembangan Permukiman; Kegiatan : - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; ✓ Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
7.	MICHO ZP, ST /NIP.19920915 201902 1 002	Penata Muda TK.I (III/b)	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	▪ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Kegiatan : - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota; ✓ Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.
8.	MUHAMMAD EFENDI, ST /NIP.19900107 201404 1	Penata TK.I (III/d)	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	▪ Program Penataan Bangunan Gedung; Kegiatan : - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di

001				Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ✓ Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota :
9.	TRI ROBERTO, ST/ NIP. 19901116 202202 1 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Infrastruktur	▪ Program Penataan Bangunan Gedung; Kegiatan : - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ; ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.
10.	LEKA KHOMALRIAH, S.ST/NIP.19940402202012 2015	Penata Muda (III/a)	Analisis Infrastruktur	▪ Program Penataan Bangunan Gedung; Kegiatan : - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung. ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan

					Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
11.	ZULHIJRI AROHMAN, S.T /NIP. 19940519 202012 1 005	Penata Muda (III/a)	Analisis Potensi Sumber Air Tanah		▪ Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Kegiatan : - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ✓ Sub Kegiatan Pembangunan Breakwater ✓ Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai ✓ Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
12.	MIRWAN, S.Ars/ NIP. 19901130 202012 1 004	Penata Muda (III/a)	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan		▪ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Kegiatan : - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota ; ✓ Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan ; - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya;
13.	ARJAFARI, ST/ NIP.19871021 201902 1 002	Penata Muda TK.I (III/b)	Teknik Jalan dan Jembatan		▪ Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Kegiatan : - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan :

				✓ Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.
14.	RANDI SUGENG PRASETYO, S.T/NIP. 19891124 202202 1 002	Penata Muda (III/a)	Pengawas Jaringan Utilitas	▪ Program Kawasan Permukiman kegiatan : - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha : ✓ Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh.
15.	NUR ROBBY HIDAYA, ST/ NIP.19960411 202202 1 001	Penata Muda (III/a)	Pengawas Jaringan Utilitas	▪ Program Pengembangan Perumahan; Kegiatan : - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota: ✓ Sub Kegiatan Rehab Rumah Bagi Korban Bencana ✓ Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.
16.	MHD.TAIMI, ST/ NIP. 19820705 201404 1 001	Penata TK.I (III/d)	Teknik Jalan dan Jembatan	▪ Program Penyelenggaraan Jalan; Kegiatan : - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota; ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan. ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

17.	NOPIYANTO, ST/ NIP.19901102 201404 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Teknik Jalan dan Jembatan	▪ Program Penyelenggaraan Jalan; Kegiatan : - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota; ✓ - Sub Kegiatan Pembangunan Jalan ▪ Program Penyelenggaraan Jalan; Kegiatan : - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota; ✓ - Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan ▪ Program Penyelenggaraan Jalan; Kegiatan : - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota; ✓ - Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan.
18.	WILDAN HALIM, S.Tr.T/ NIP.19980310 202202 1 002	Penata Muda (III/a)	Teknik Pengairan	
19.	AHMUHARDI ABDUL AZIZ, ST/NIP. 19960604 202012 1 008	Penata Muda (III/a)	Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air	
20.	ARIF GUNAWAN, ST/ NIP.19860217 201902 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Subbagian Tata Usaha	▪ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Kegiatan : - Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota ✓ Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ▪ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan : - Administrasi Umum Perangkat Daerah ✓ Sub Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : Januari 2025



SYARIF AHMAD, SE.M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19770720 201901 1 016